



LKPJ 2023

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN**



**KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Binuang Tahun 2023 ini dapat diselesaikan penyusunannya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 4 tentang Laporan Penyelenggaraan Camat Kepada Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Camat Kepada Bupati, dan Informasi Laporan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini berisikan tentang gambaran umum daerah, kebijakan kecamatan, kebijakan umum pengelolaan keuangan kecamatan, penyelenggaraan urusan kecamatan, penyelenggaraan tugas pembantuan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Kami menyadari bahwa semua yang telah berhasil dicapai dalam pembangunan merupakan hasil kerja keras dan kerja sama serta partisipasi semua pihak, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat Kecamatan Binuang. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan, sumbangan tenaga dan pikiran dalam rangka terselenggaranya pembangunan dan pemerintahan Kecamatan Binuang.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas di masa yang akan datang, serta semoga kita selalu dalam bimbingan dan lindungan-Nya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dibuat dan disampaikan kepada Bupati Tapin yang terhormat, semoga bermanfaat untuk kita semua.



Binuang, 19 Januari 2024

Camat Binuang,

H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep,Ners, MM
NIP.19781001 201001 1 013

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Dasar Pembentukan SKPD..... | 1 |
| 1.2. Visi dan Misi SKPD..... | 4 |
| 1.3. Data Umum SKPD..... | 6 |
| 1. Jumlah ASN, Kuafikasi Pendidikan | 6 |
| 2. Realisasi Anggaran Belanja SKPD | 8 |
| 3. Permasalahan Strategis SKPD | 13 |
| BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH | 15 |
| 2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan | 15 |
| 1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja | 16 |
| 2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan pada setiap | 21 |
| 3. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja..... | 24 |
| 2.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar | |
| 1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..... | 31 |
| 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana | 31 |
| 3. Kebijakan | 32 |
| 4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD | 32 |
| 5. Target | 34 |
| 6. Realisasi Program dan Kegiatan | 36 |
| 7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan..... | 41 |
| 8. Upaya Mengatasi Permasalahan | 41 |
| 9. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD | 42 |

BAB III PENUTUP 43

3.1 Kesimpulan..... 43

3.2 Saran-Saran..... 44

Lampiran – Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

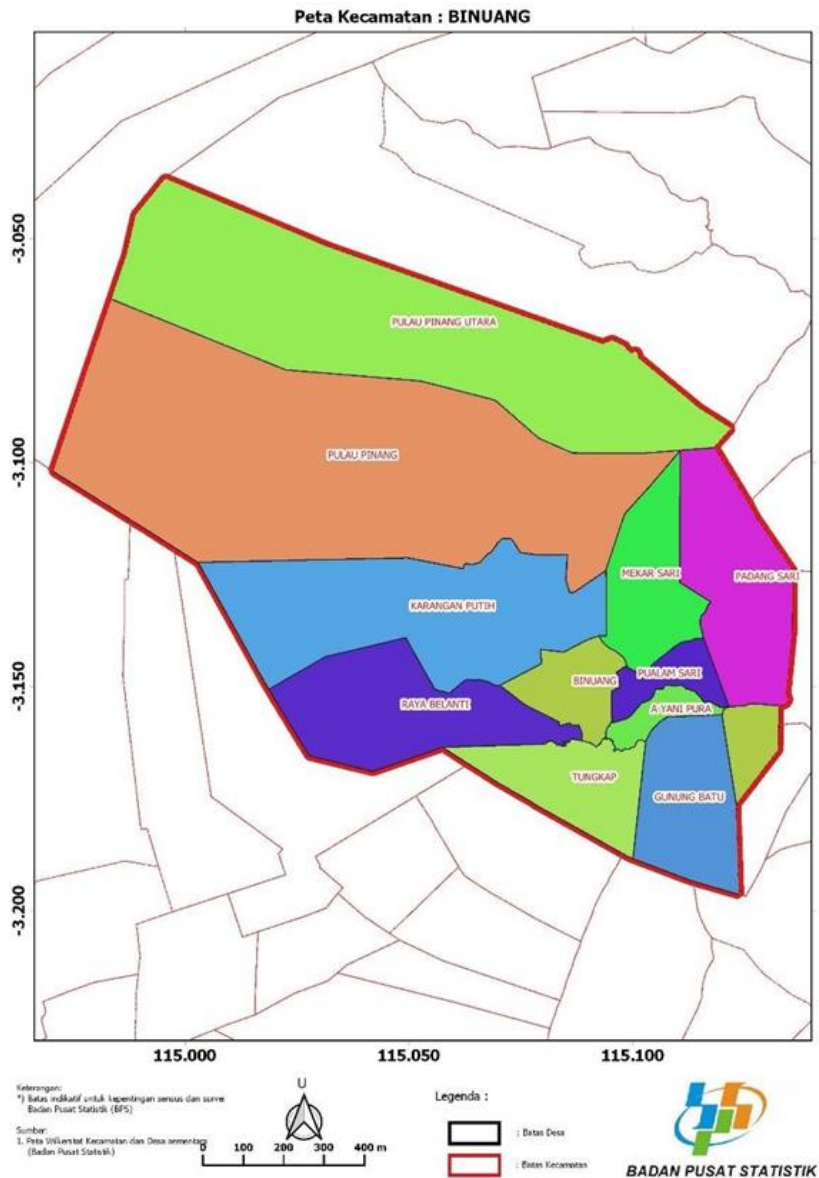
1.1. Dasar Pembentukan SKPD

1. Undang- Undang No. 8 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah tingkat II Tapin mengubah UU No. 27 tahun 1959, yang menjadikan dan membentuk daerah tingkat II Tapin, yang meliputi wilayah Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan;
2. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk Kecamatan Binuang dengan tipe A;
4. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Binuang Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan maksud sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap aparatur Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang juga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pertanggungjawaban keberhasilan / kegiatan pelaksanaan oleh SKPD dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

▪ **Kondisi Geografis Daerah**

Kecamatan Binuang adalah salah satu Kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin, dengan luas wilayah ± 218,10 Km² dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Tapin (Rantau) sejauh ± 28 Km. dan ± 85 Km dari Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin).



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kecamatan Binuang

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

Kecamatan Binuang berada pada ketinggian 300 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut dan terletak antara 2°32'43' – 3°00'43" Lintang Selatan dan 114°46'13" – 115°30'33" Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Binuang sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tapin Selatan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat : Kecamatan Tapin Tengah dan Kabupaten Banjar
- Sebelah Timur : Kecamatan Hatungun.

Luas wilayah Kecamatan Binuang adalah berupa daratan seluas 196,83 Km², terdiri dari 3 Kelurahan dan 8 Desa dengan rincian luas sebagaimana pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Luas Kelurahan dan Desa di Kecamatan Binuang

| No | Kelurahan / Desa | Luas Wilayah (Km ²) |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1 | Binuang | 6,07 |
| 2 | Karangan Putih | 24,00 |
| 3 | Raya Belanti | 12,67 |
| 4 | Tungkap | 8,54 |
| 5 | A Yani Pura | 1,97 |
| 6 | Gunung Batu | 10,70 |
| 7 | Padang Sari | 12,34 |
| 8 | Pualam Sari | 2,81 |
| 9 | Pulau Pinang | 61,50 |
| 10 | Pulau Pinang Utara | 48,17 |
| 11 | Mekar Sari | 8,06 |
| Total Luas Wilayah | | 196,83 |

Sumber: Kecamatan Binuang Dalam Angka 2023 diakses dari <https://tapinkab.bps.go.id>

▪ **Gambaran Umum Demografis**

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, penduduk Kecamatan Binuang adalah 32.282 jiwa, yang terdiri dari 16.002 jiwa penduduk laki-laki dan 16.280 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya, penduduk Kecamatan Binuang berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing kelurahan/desa dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Penduduk Kecamatan Binuang Menurut Jenis Kelamin

| No | Kelurahan / Desa | Jumlah Penduduk | | Jumlah |
|---------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Binuang | 3.347 | 3.508 | 6.855 |
| 2 | Karangan Putih | 1.920 | 1.927 | 3.847 |
| 3 | Raya Belanti | 2.222 | 2.220 | 4.442 |
| 4 | Tungkap | 1.976 | 2.049 | 4.025 |
| 5 | A Yani Pura | 1.251 | 1.278 | 2.529 |
| 6 | Gunung Batu | 686 | 704 | 1.390 |
| 7 | Padang Sari | 328 | 347 | 675 |
| 8 | Pualam Sari | 1.128 | 1.126 | 2.254 |
| 9 | Pulau Pinang | 1.202 | 1.217 | 2.419 |
| 10 | Pulau Pinang Utara | 1.347 | 1.368 | 2.715 |
| 11 | Mekar Sari | 595 | 536 | 1.131 |
| Jumlah | | 16.002 | 16.280 | 32.282 |

Sumber: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

1.2. Visi dan Misi SKPD

Visi dan Misi Kecamatan Binuang termuat dalam RENSTRA Kecamatan Tahun 2018-2023. Telaahan Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam membangun daerah dan mengacu pada Visi Kepala Daerah, maka Visi Pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 tahun ke depan adalah: **“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”**. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka Visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a) **Bersama** : Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.

- b) **Mewujudkan** : Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan dicita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
- c) **Maju** : Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
- d) **Sejahtera** : Mengandung makna suatu kehidupan dan penghidupan sosial.

1. Visi Kecamatan Binuang

Visi Kecamatan merupakan implementasi dari visi Kabupaten yaitu ***“Terwujudkan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera”***.

2. Misi Kecamatan Binuang

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan di atas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari Desa
- 3) Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Misi Kecamatan Binuang yang merupakan implementasi Misi dari Kabupaten Tapin yaitu point 1 dan 5.

1.3. Data Umum SKPD

1. Jumlah ASN, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional di SKPD

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di SKPD Kecamatan Binuang Tahun 2023 sebanyak 25 orang dengan rincian: 11 ASN di Kecamatan Binuang, 4 ASN di Kelurahan Raya Belanti, 5 ASN di Kelurahan Binuang, dan 5 ASN di Kelurahan Karang Putih sebagaimana pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Data ASN Kecamatan Binuang Tahun 2023

| No | Nama / NIP | Kualifikasi Pendidikan | Pangkat dan Golongan | Jabatan | Keterangan |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| KECAMATAN BINUANG | | | | | |
| 1 | H. Henderiyanoor Efendi, S.Kep, Ners, MM NIP. 198601012011011015 | Strata II | Penata Tk. I / III d | Camat | Struktural / Eselon III a |
| 2 | Esti Sapto Rini, SP, MM NIP.197210132014062001 | Strata II | Penata / III c | Sekretaris Camat | Struktural / Eselon III b |
| 3 | Hj. Darmiyati Ayu, S.Sos, M.AP NIP.197010091993032007 | Strata II | Pembina / IV a | Kasi Kesejahteraan Rakyat | Struktural / Eselon IV a |
| 4 | Edy Trirahmady, S.Pd.I NIP.198007272009041005 | Strata I | Penata Tk. I / III d | Kasi Trantib | Struktural / Eselon IV a |
| 5 | Maya Rahman, S.Kep,Ners NIP.198708122010012027 | Strata I | Penata Tk. I / III d | Kasi Pemerintahan | Struktural / Eselon IV a |
| 6 | Hj. Aminah, S.Pd,MM NIP.198009012009042002 | Strata II | Penata / III c | Kasi Perekonomian | Struktural / Eselon IV a |
| 7 | Jurhana Yati, S.AP NIP.197602122010012004 | Strata I | Penata Muda Tk. I / III b | Kasi Pembangunan | Struktural / Eselon IV a |
| 8 | Nelly Hartati, S.Pd,MM NIP.198808242015032002 | Strata II | Penata / III c | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | Struktural / Eselon IV b |
| 9 | Erwan Aspani, S.Kom NIP.198506092014031003 | Strata I | Penata Muda Tk. I / III b | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Struktural / Eselon IV b |
| 10 | Mahda Yuniar Emha, A.Md NIP.198811032020122005 | Diploma III | Pengatur / II c | Pengelola Program dan Kegiatan | Fungsional Umum |
| 11 | Syariansyah NIP.197208272014061001 | SLTA / Sederajat | Pengatur / II c | Pengadministrasi Umum | Fungsional Umum |
| KELURAHAN RAYA BELANTI | | | | | |
| 1 | Jaidi, A.Md.Kes NIP.196610151988121002 | Diploma III | Penata Tk. I / III d | Lurah | Struktural / Eselon IV a |
| 2 | Chairun Nisa, SE NIP.198303262011012008 | Strata I | Penata Tk. I / III d | Sekretaris Lurah | Struktural / Eselon IV b |
| 3 | Anjar Pratama, S.Kep,Ners, MM NIP.198807092010011004 | Strata II | Penata / III c | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | Struktural / Eselon IV b |
| 4 | Andri Perdana, A.Md NIP.198912242011011003 | Diploma III | Penata Muda Tk. I / III b | Kasi Pemerintahan | Struktural / Eselon IV b |

| KELURAHAN BINUANG | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Hj. Umie Amelea Artha, SKM,MM NIP. 197108081992032007 | Strata II | Pembina /IV a | Lurah | Struktural / Eselon IV a |
| 2 | Purnama Yanti, S.AP,MM NIP. 198305272012122003 | Strata II | Penata Muda Tk. I / III b | Sekretaris Lurah | Struktural / Eselon IV b |
| 3 | Rahmatullah Faisal, S.Kom NIP. 198112012009041002 | Strata I | Penata Tk. I / III d | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | Struktural / Eselon IV b |
| 4 | Aneta Fahriana, SE NIP. 197812082006042018 | Strata I | Penata Tk. I / III d | Kasi Pemerintahan | Struktural / Eselon IV b |
| 5 | Arpah, A.Md NIP. 199608172020122012 | Diploma III | Pengatur / II c | Pengelola Program dan Kegiatan | Fungsional Umum |
| KELURAHAN KARANGAN PUTIH | | | | | |
| 1 | Duana, A.Ma.Pd NIP.196512111986081002 | Diploma II | Pembina / IV a | Plt. Lurah | Fungsional Umum |
| 2 | Herru Sutarmiyah, S.AP NIP. 197504292012122001 | Strata I | Penata Muda Tk. I / III b | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | Struktural / Eselon IV b |
| 3 | Roesby Elmathin, A.Md NIP.198909272011011004 | Diploma III | Penata Muda / III a | Pengadministrasi Umum / Plt Kasi Pemerintahan | Fungsional Umum |
| 4 | Ridha Rahmawati, A.Md NIP. 199107092020122006 | Diploma III | Pengatur / II c | Pengelola Program dan Kegiatan | Struktural / Eselon IV b |
| 5 | Bambang Ariyanto NIP.197212101997031007 | SLTA / Sederajat | Pengatur Tk. I / II d | Pengadministrasi Umum | Fungsional Umum |

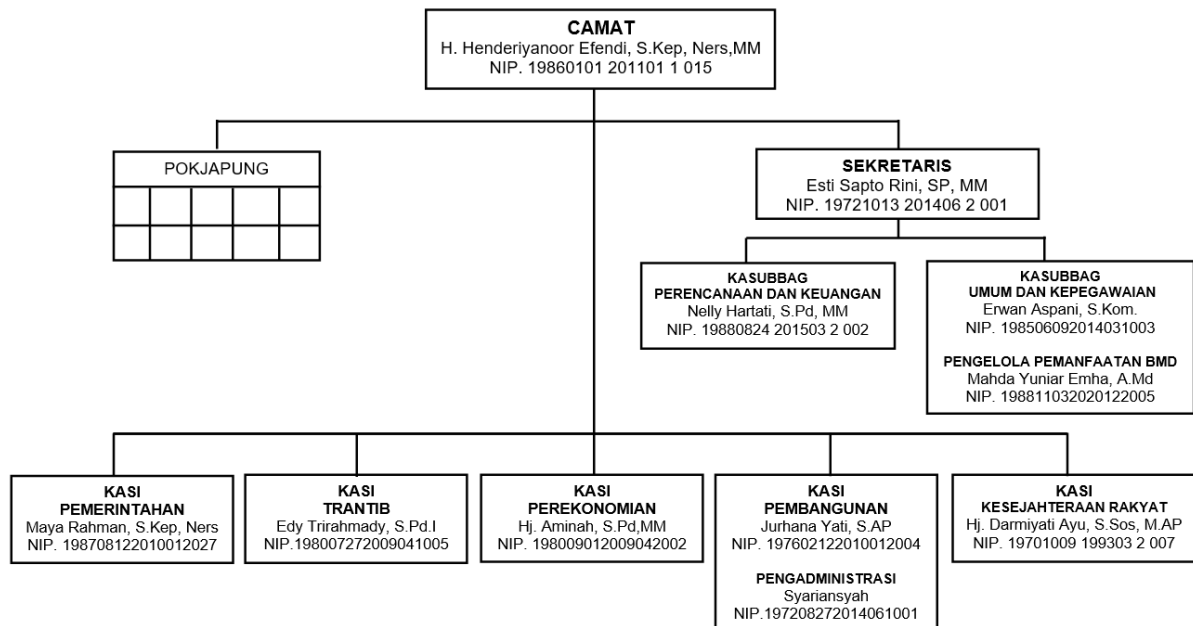
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Binuang Tahun 2023

Dari tabel tersebut kualifikasi pendidikan tertinggi ialah Strata II sebanyak 8 orang, diikuti Strata I sebanyak 8 orang, Diploma III sebanyak 6 orang, Diploma II sebanyak 1 orang dan SLTA/Sederajat sebanyak 2 orang.

Pangkat dan golongan tertinggi ialah Pembina / IV a sebanyak 3 orang, diikuti Penata Tk. I / III d sebanyak 7 orang, Penata / III c sebanyak 4 orang, Penata Muda Tk. I / III b sebanyak 4 orang, Penata Muda / III a sebanyak 1 orang, Pengatur Tk. I / II d sebanyak 1 orang, dan Pengatur / II c sebanyak 5 orang.

Adapun jumlah pejabat struktural sebanyak 19 orang dan pejabat fungsional umum sebanyak 6 orang. Pejabat struktural terdiri dari eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV a sebanyak 7 orang, dan eselon IV b sebanyak 10 orang.

Struktur organisasi SKPD Kecamatan Binuang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Binuang

2. Realisasi Anggaran dan Belanja SKPD

Penetapan indikator kinerja pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi.

Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerjanya. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pada awal Tahun Anggaran 2023, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kecamatan Binuang telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kecamatan Binuang yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kecamatan Binuang, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Binuang, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) memuat semua anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Non Program dan Non Kegiatan). Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara garis besar, capaian kinerja keuangan pelaksanaan program dan kegiatan serta non program dan non kegiatan pada Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dapat digambarkan dalam Rekapitulasi Plafon Anggaran dan Realisasi Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Rekapitulasi Realisasi Anggaran SKPD Kecamatan Binuang
Tahun 2023

| No | Uraian | Tahun 2023 | | |
|----|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| | | 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 | | |
| | | Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Belanja Pegawai/ Non Kegiatan | 3.426.142.329 | 3.214.427.369 | 93,82 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.518.932.708 | 3.263.251.205 | 92,73 |
| 3 | Belanja Modal | 1.535.530.440 | 1.491.346.442 | 97,12 |
| | JUMLAH | 8.480.605.477 | 7.969.025.016 | 93,97 |

Sumber : FMIS Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023

Tabel 1.5
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Persentase
SKPD Kecamatan Binuang Tahun 2023

| No | PROGRAM / KEGIATAN | TAHUN 2023 | | % |
|----------|---|---------------|---------------|-------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.916.636.819 | 5.517.603.510 | 93,26 |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.008.000 | 6.008.000 | 100 |
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.008.000 | 6.008.000 | 100 |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.430.940.729 | 3.219.225.569 | 93,83 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.426.142.329 | 3.214.427.369 | 93,82 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | 2.399.200 | 2.399.100 | 100 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2.399.100 | 2.399.100 | 100 |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 944.623.284 | 926.549.647 | 98,09 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 65.532.966 | 65.203.000 | 99,50 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 36.681.243 | 36.499.680 | 99,51 |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 91.571.506 | 87.014.840 | 95,02 |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 21.809.413 | 21.709.254 | 99,54 |
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 729.028.156 | 716.122.873 | 98,23 |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 922.241.734 | 810.277.692 | 87,86 |
| 1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 476.013.806 | 469.420.704 | 98,61 |
| 2 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 446.227.928 | 340.856.988 | 76,39 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 333.231.456 | 332.441.450 | 99,76 |
| 2 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.045.456 | 6.040.000 | 99,91 |
| 3 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.777.040 | 50.770.090 | 99,99 |
| 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 276.408.960 | 275.631.360 | 99,72 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 279.591.616 | 223.101.152 | 79,82 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | 69.655.616 | 68.851.152 | 98,85 |
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 209.936.000 | 154.250.000 | 73,47 |
| II | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 36.226.000 | 36.225.900 | 100 |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 36.226.000 | 36.225.900 | 100 |
| 1 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tapin Tengah) | 36.226.000 | 36.225.900 | 100 |
| III | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 2.242.219.632 | 2.138.710.488 | 95,38 |
| | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 216.471.642 | 216.439.848 | 99,99 |
| 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4.417.500 | 4.417.300 | 99,99 |
| 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 212.054.142 | 212.022.548 | 99,99 |
| | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.025.747.990 | 1.922.270.640 | 94,89 |
| 1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 700.500.966 | 695.072.750 | 99,23 |

| | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1.325.247.024 | 1.227.197.890 | 92,60 |
| IV | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 130.458.434 | 130.455.320 | 100 |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 130.458.434 | 130.455.320 | 100 |
| 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 128.249.684 | 128.246.670 | 100 |
| 2 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 2.208.750 | 2.208.650 | 100 |
| V | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 117.474.398 | 117.469.148 | 100 |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 117.474.398 | 117.469.148 | 100 |
| 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 117.474.398 | 117.469.148 | 100 |
| VI | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 37.590.194 | 28.560.650 | 75,98 |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 37.590.194 | 28.560.650 | 75,98 |
| 1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 2.208.750 | 2.208.750 | 100 |
| 2 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa | 8.835.000 | 8.832.050 | 99,97 |
| 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat Desa | 2.208.750 | 2.205.900 | 99,87 |
| 4 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 2.208.750 | 2.208.750 | 100 |
| 5 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 22.128.944 | 13.105.200 | 59,22 |
| | JUMLAH | 8.480.605.477 | 7.969.025.016 | 93,97 |

Sumber : FMIS Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tahun 2023

Hasil yang dicapai dari belanja SKPD kegiatan-kegiatan yang dibiayai Anggaran Belanja Tidak Langsung (non program non kegiatan) adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai / Non Program

- 1) Terlaksananya pembayaran Gaji Pegawai;
- 2) Terlaksananya pembayaran Tunjangan Pegawai, meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, dan tunjangan lainnya.

- 3) Terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan pegawai meliputi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan prestasi kerja.

Total realisasi anggaran untuk belanja pegawai / non program tersebut ialah Rp. 3.214.427.369,- Sedangkan anggaran belanja langsung dianggarkan untuk melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Binuang meliputi:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /semesteran SKPD
- e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f) Penyediaan bahan Logistik kantor
- g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h) Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- j) Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- k) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- l) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- m) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- n) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- o) Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
- p) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa

- b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
- c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- d) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

IV. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- a) Sinergitas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b) Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum

- a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara

IV. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- b) Fasilitasi Penyusunan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- c) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d) Fasilitasi Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- e) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Lebih rinci anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.054.463.148,- beserta realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 4.754.597.647,- pada masing masing kegiatan yang menggambarkan akuntabilitas kinerja keuangan bisa dilihat pada Lampiran Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Tahun 2023.

3. Permasalahan Strategis SKPD

Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Binuang Tahun Anggaran 2023 tidak ditemukan kendala dan hambatan yang berarti. Walaupun ada kendala atau hambatan yang dihadapi tetapi hal tersebut tidak berpengaruh besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD Kecamatan Binuang. Permasalahan strategis yang dihadapi serta solusi atau kebijakan yang diambil oleh SKPD Kecamatan Binuang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Masih terbatasnya SDM aparatur di SKPD Kecamatan Binuang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Permasalahan ini diatasi dengan penambahan aparatur yang memiliki kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis. Disamping itu pemberian kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi melalui izin belajar, bimbingan teknis, dan diklat struktural/ fungsional sesuai dengan bidangnya. Mekanisme *reward* dan *punishment* juga diterapkan guna meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur.
- b) Belum tersedianya jaringan internet (*Indihome*) di Kantor Kecamatan Binuang sehingga dapat menghambat kecepatan pelayanan. Permasalahan ini diatasi dengan penggunaan modem *Telkomsel (Orbit)* yang menghadirkan jangkauan jaringan yang luas dan stabil untuk pelayanan.
- c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membangun perekonomian kelurahan/desa. Solusi permasalahan ini ialah dengan mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung kemandirian ekonomi desa.
- d) Kurangnya tanggapan dari pemangku kepentingan/stakeholder terhadap usulan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini Kecamatan Binuang memotivasi para tokoh masyarakat mengajukan usulan serta pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan partisipasi aktif masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan Binuang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu yang menjadi dasar dalam melaksanakan urusan wajib adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pada Pasal 76, dijelaskan diantaranya kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, dan kode kegiatan.

Mendasari hal tersebut diatas, klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi, SKPD Kecamatan Binuang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Umum yang merupakan urusan wajib ke-20 (dua puluh).

Urusan Wajib yang dilaksanakan Kecamatan Binuang sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- b) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati;
- c) Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d) Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan ketenteraman umum dan ketertiban umum;
- e) Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f) Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- g) Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h) Menyusun, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- i) Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sedangkan fungsi Kecamatan Binuang ialah:

- a) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
- b) Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c) Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e) Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
- f) Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
- g) Pengelolaan kesekretariatan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja yang di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Secara keseluruhan capaian serapan dana yang digunakan pada TA. 2023 oleh Kecamatan Binuang adalah Rp 7.969.025.016,- atau sebesar 93,97% dari jumlah Rp 8.480.605.477,- Anggaran yang disediakan terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan), Belanja Program Kegiatan yang di gambarkan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Seluruh Program Kegiatan di Kecamatan Binuang

| No. | Sasaran Strategis Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Realisasi / Capaian |
|-----|---|---|-------------|---------------------|
| 1 | Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan | 89 Poin | 89,03 Poin |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B | 100 % | 100 % |
| | | Persentase rekomendasi yang diselesaikan | 100 % | 100 % |
| | | Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan | 100 % | 100 % |
| 3 | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan | 100% | 100% |
| | | Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan | 100% | 100% |
| | | Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik | 100% | 100% |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 72,82 Score | 72,65 Score |
| 5 | Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah | Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah | 18,9 Poin | 18,9 Poin |

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023

Tabel 2.2
Capaian Kinerja di Sekretariat dan Seksi- Seksi di Kecamatan Binuang

| NO | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|-------------|--|--|---|---|
| I. | Sekretaris | | | |
| 1 | Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) (Pengukuran Kinerja) (Pelaporan Kinerja) (Evaluasi Internal) | Score 24,58 19,08 10,62 18,54 | Score 22,6 22,5 10,05 15,50 |
| 2 | Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan | Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN | Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% | 100 % | 100 % |
| 4 | Meningkatnya Pelayanan Sekretariat | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat | 70 Poin | 71 Poin |
| I.a. | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah | Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang | 100 % | 100 % |
| 2 | Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah | Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti | 100 % | 100 % |
| | | Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % |
| 3 | Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan | 100 % | 100 % |

| | | | | |
|--|---|--|-------|-------|
| | | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | 100 % | 100 % |
| I.b. Kasubag Umum dan Kepegawaian | | | | |
| 1 | Meningkatnya ASN yang berkualitas | Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas | 2 % | 2 % |
| 2 | Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD) | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik | 80 % | 80 % |
| 3 | Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian | Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik | 100 % | 100 % |
| II. Seksi Pemerintahan | | | | |
| 1 | Tersedianya Pelayanan Rekomendasi Pemerintahan | Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan | 100 % | 100 % |
| 2 | Terlaksananya pembinaan tentang dokumen pemerintahan desa | Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi) | 100 % | 100 % |
| 3 | Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa | Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75% | 100 % | 100 % |
| 4 | Terlaksananya pembinaan pengelolaan aset desa | Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik | 80 % | 80 % |
| 5 | Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di desa | Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu | 100 % | 100 % |
| III. Seksi Ekonomi | | | | |
| 1 | Tersedianya Pelayanan Rekomendasi izin usaha | Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan | 100% | 100% |

| | | | | |
|------------|--|--|------|------|
| IV. | Seksi Kesejahteraan Rakyat | | | |
| 1 | Tersedianya rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat | Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan | 100% | 100% |
| V. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | |
| 1 | Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat | Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani | 100% | 100% |
| VI. | Seksi Pembangunan | | | |
| 1 | Terakomodirnya usulan anggaran RKPDes/Kel dalam Desk Forum SKPD | Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD | 75% | 75% |

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023

2. Capaian Kinerja Keluaran Masing- Masing Kegiatan pada Setiap Urusan Pemerintahan Penunjang Sesuai dengan Target dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi serta Solusi Pemecahannya

Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada SKPD Kecamatan Binuang dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Keluaran Masing- Masing Kegiatan

| No | Program | Kegiatan | Sasaran | Capaian Kinerja |
|--|--|--|--|--|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah | Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang: 100% (Tercapai) |
| | | | Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah | Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti: 100% (Tercapai) |
| | | | | Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti: 100 % (Tercapai) |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan :100 % (Tercapai) |
| | | | | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): 100 % (Tercapai) |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya ASN yang berkualitas | Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan Kapasitas: 2 % (Tercapai) |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah (BMD) | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik: 80 % (Tercapai) | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Tata Kelola administrasi kepegawaian | Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik: 100 % (Tercapai) |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah (BMD) | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik: 80 % (Tercapai) |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di desa | Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu: 100 % (Tercapai) |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terakomodirnya usulan anggaran RKPDes/Kel dalam Desk Forum SKPD | Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD :75 % (Tercapai) |
| | | | Tersedianya rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat | Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan: 100 % (Tercapai) |
| | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Tersedianya Pelayanan Rekomendasi izin usaha | Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan: 100 % (Tercapai) |
| 4 | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat | Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani: 100 % (Tercapai) |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat | Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani: 100 % (Tercapai) |
| 6 | Program Pembinaan dan | Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi | Tersedianya Pelayanan Rekomendasi | Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk |

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| Pengawasan Pemerintahan Desa | Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Pemerintahan | diterbitkan: 100 % (Tercapai) |
| | | Terlaksananya pembinaan tentang dokumen pemerintahan desa | Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi): 100 % (Tercapai) |
| | | Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa | Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75%: 100 % (Tercapai) |
| | | Terlaksananya pembinaan pengelolaan aset desa | Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik: 100 % (Tercapai) |

Sedangkan capaian kinerja keluaran untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan) / belanja non program, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Keluaran untuk Belanja Pegawai

| No. | Belanja Pegawai / Non Program | Sasaran | Satuan | Capaian Kinerja |
|-----|-------------------------------|---|--------|---|
| 1. | Gaji dan Tunjangan | Seluruh pegawai yang ada di Kecamatan Binuang | 100% | Terpenuhinya pembayaran seluruh gaji dan tunjangan Pegawai di Kecamatan Binuang |

a. Masalah yang dihadapi

Adapun permasalahan yang dihadapi meliputi:

- 1) Masih terbatasnya sumber daya manusia aparatur, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang-bidang teknis.
- 2) Keterlambatan petunjuk teknis / petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis / petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten;
- 3) Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

b. Solusi Pemecahannya

Adapun solusi dari permasalahan tersebut yakni:

- 1) Perlunya penambahan aparatur yang didukung oleh kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis. Disamping itu memberikan kesempatan kepada aparatur yang sudah ada untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar, diklat struktural/fungsional sesuai dengan bidangnya.
- 2) Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.
- 3) Meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Dalam hal penyusunan kegiatan dan target –target kinerja program yang akan di tuangkan dalam perjanjian kerja masing- masing seksi/PPTK yang bertanggungjawab langsung kepada pengguna anggaran/Kepala SKPD, diawali dengan penyusunan Restra SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah (RPJM) Kabupaten.

Dalam hal penyusunan Renja SKPD merupakan dasar bagi penyusunan RKPD dan selanjutnya menjadi acuan penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plapong anggaran sementara (PPAS) yang merupakan tahap awal penyusunan RAPBD.

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 adalah sebagai pedoman arah kerja bagi Kecamatan Binuang untuk jangka satu tahun, kebijakan dan program kegiatan di sesuaikan antara program daerah, program provinsi dan program nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien yaitu dengan memperhatikan panduan rencana program/kegiatan tahunan sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas, selain itu juga agar setiap program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggungjawab, meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja

Sehingga menghasilkan kesesuaian antara kegiatan, target kinerja yang telah di tetapkan dalam perjanjian kinerja, seperti yang termuat dalam tabel analisis kinerja pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja

| No. | Program dan Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Penanggung jawab |
|-----|--|--|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Nilai Komponen AKIP - Perencanaan Kinerja - Pengukuran Kinerja - Pelaporan Kinerja - Evaluasi Internal | Score 24,58 19,08 10,62 18,54 | Sekretaris |
| | | Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut dari hasil temuan pemeriksaan | Persentase hasil temuan pemeriksaan yang di tindaklanjuti | 100 % | |
| | | Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN | Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 % | 18,9 Poin | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Sekretariat | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat | 70 Poin | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah | Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang | 100 % | Kasubag Renkeu |
| | | Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah | Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti | 100 % | |
| | | | Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti | 100 % | |
| 2 | Administrasi Keuangan | Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan | Persentase Surat Pertanggungjawaban yang | 100 % | Kasubag Renkeu |

| | | | | | |
|-----------|---|---|--|---------|-------------------|
| | Perangkat Daerah | Perangkat Daerah | sesuai dengan standar penatausahaan keuangan | | |
| | | | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | 100 % | |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya ASN yang berkualitas | Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas | 2 % | Kasubag Umpeg |
| 4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD) | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik | 80 % | Kasubag Umpeg |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian | Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik | 100 % | Kasubag Umpeg |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD) | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik | 80 % | Kasubag Umpeg |
| II | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik | 89 Poin | Camat |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak | Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di desa | Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu | 100 % | Kasi Pemerintahan |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---------|-------------------|
| | Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | |
| III | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan | 89 Poin | Camat |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B | 100 % | |
| | | | Persentase Rekomendasi yang diselesaikan | 100 % | |
| 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terakomodirnya usulan anggaran RKPDes/Kel dalam Desk Forum SKPD | Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD | 75 % | Kasi Pembangunan |
| | | Tersedianya rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat | Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan | 100 % | Kasi Kesra |
| 2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Tersedianya Pelayanan Rekomendasi izin usaha | Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan | 100 % | Kasi Perekonomian |
| IV | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan | 100 % | Camat |
| 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan | Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat | Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan | 100 % | Kasi Trantib |

| | | | | | |
|-----------|---|---|--|-------|-------------------|
| | Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | masyarakat yang tertangani | | |
| V | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan | 100 % | Camat |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat | Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani | 100 % | Kasi Trantib |
| VI | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Persentase Rekomendasi yang diselesaikan | | Camat |
| | | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan | 100 % | |
| | | | Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan | 100 % | |
| | | | Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik | 100 % | |
| 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan | Tersedianya Pelayanan Rekomendasi Pemerintahan | Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan | 100 % | Kasi Pemerintahan |

| | | | |
|------------------------------|---|--|-------|
| Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya pembinaan tentang dokumen pemerintahan desa | Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi) | 100 % |
| | Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa | Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75% | 100 % |
| | Terlaksananya pembinaan pengelolaan aset desa | Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik | 100 % |

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023

Dari tabel diatas di ketahui adanya kesesuaian antara program kinerja kegiatan dengan target kinerja di masing- masing seksi-seksi di Kecamatan karena di susun berdasarkan dari Renja SKPD yang bersumber dari RPJM (Renstra) yang telah dibuat sebelumnya.

2.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
 - f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - g. Pengelolaan kesekretariatan, dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberika oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun tahun 2017 di Bab 1 Pasal 1, point 4 yang di maksud dengan Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, di point 5 Camat adalah Koordinator dan penyelenggaraan pemerintahan di walayah kerja Kecamatan yang

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin yang terletak di Jalan Lingkar Binuang Baru, Binuang.

3. Kebijakan

Tidak ada kebijakan atau pelimpahan kewenangan lain yang diserahkan ke Kecamatan Binuang selain tugas pokok di atas.

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD pada Tahun Anggaran 2022

Berikut Uraian Program dan Kegiatan di Kecamatan Binuang dari APBD yang dilaksanakan di Tahun 2022.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
3. Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah Kecamatan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

IV. Program Kordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

a. Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

VI. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa

1. Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
2. Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
3. Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
5. Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya

5. Target

Target adalah hasil yang akan dicapai pada tingkat outcome yang segera dapat terlihat setelah output dicapai (immediate outcome), untuk tingkat SKPD Kecamatan Tapin Tengah data tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Target Kecamatan Binuang Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja (Outcome) | Target |
|------------|---|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan | 89,03 Poin |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Persentase Layananan Masyarakat dengan Indeks Minimal B | 100 % |
| | | Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan | 100 % |
| | | Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan | 100 % |
| 3 | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan | 100% |
| | | Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan | 80% |
| | | Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik | 100% |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 72,82 Score |
| 5 | Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah | Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah | 18,9 Poin |

6. Realisasi Program dan Kegiatan

Tabel 2.7
Program dan Kegiatan Kecamatan Binuang Tahun 2023

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | Rincian Anggaran | | | Indikator Keberhasilan | | | |
|----|--|------------------|----------------|----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) | Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.916.636.819 | 5.517.603.510 | 93,26 | Meningkatnya Capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Nilai Komponen AKIP Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal | 72,82 Score | 72,65 Score |
| | | | | | Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan | Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % |
| | | | | | Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN | Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 % | 100 % | 100 % |
| | | | | | Meningkatnya Pelayanan Sekretariat | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat | 70 Poin | 71 Poin |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.008.000 | 6.008.000 | 100 | Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah | Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang | 100 % | 100 % |
| | | | | | Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah | Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti | 100 % | 100 % |
| | | | | | | Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|-------|--|--|-------|-------|
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.430.940.729 | 3.219.225.569 | 93,83 | Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan | 100 % | 100 % |
| | | | | | | Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | 100 % | 100 % |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 944.623.284 | 926.549.647 | 98,09 | Meningkatnya ASN yang berkualitas | Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas | 2 % | 2 % |
| 4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 922.241.734 | 810.277.692 | 87,86 | Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD) | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik | 80 % | 80 % |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 333.231.456 | 332.441.450 | 99,76 | Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian | Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik | 100 % | 100 % |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 279.591.616 | 223.101.152 | 79,82 | Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD) | Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik | 80 % | 80 % |
| II | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 36.226.000 | 36.225.900 | 100 | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|-------|--|--|---------|------------|
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 36.226.000 | 36.225.900 | 100 | Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di desa | Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu | 100 % | 100 % |
| III | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 2.242.219.632 | 2.138.710.488 | 95,38 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan | 89 Poin | 89,03 Poin |
| | | | | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B | 100 % | 100 % |
| | | | | | | Persentase Rekomendasi yang diselesaikan | 100 % | 100 % |
| 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 216.471.642 | 216.439.848 | 99,99 | Terakomodirnya usulan anggaran RKPDes/Kel dalam Desk Forum SKPD | Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD | 75 % | 100 % |
| | | | | | Tersedianya rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat | Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan | 100 % | 100 % |
| 2 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 2.025.747.990 | 1.922.270.640 | 94,89 | Tersedianya Pelayanan Rekomendasi izin usaha | Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan | 100 % | 100 % |
| IV | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 130.458.434 | 130.455.320 | 100 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------|---|--|-------|-------|
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 130.458.434 | 130.455.320 | 100 | Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat | Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani | 100 % | 100 % |
| V | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 117.474.398 | 117.469.148 | 100 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan | 100 % | 100 % |
| 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 117.474.398 | 117.469.148 | 100 | Terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat | Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani | 100 % | 100 % |
| VI | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 37.590.194 | 28.560.650 | 75,98 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Persentase Rekomendasi yang diselesaikan | 100 % | 100 % |
| | | | | | Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan | 100 % | 100 % |
| | | | | | | Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan | 100 % | 100 % |
| | | | | | | Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik | 100 % | 100 % |
| 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 37.590.194 | 28.560.650 | 75,98 | Tersedianya Pelayanan Rekomendasi Pemerintahan | Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-------|-------|
| | | | | Terlaksananya pembinaan tentang dokumen pemerintahan desa | Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi) | 100 % | 100 % |
| | | | | Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan desa | Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75% | 100 % | 100 % |
| | | | | Terlaksananya pembinaan pengelolaan aset desa | Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik | 80 % | 100 % |

Sumber FMIS dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 20

7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yakni masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang-bidang teknis.

Selain itu juga masalah keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten. Ditambah lagi belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan SDM, perlu penambahan aparatur yang didukung oleh kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis. Disamping itu memberikan kesempatan kepada aparatur yang sudah ada untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar, diklat struktural/fungsional sesuai dengan bidangnya. Selain pemberian kesempatan mengikuti diklat, mekanisme-mekanisme untuk meningkatkan semangat kerja SDM seperti pemberian *reward dan punishment* serta kegiatan *team capacity building* perlu dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

Untuk mengatasi permasalahan keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten, SKPD perlu menerapkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.

Guna mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan SKPD pada seksi pemerintahan, seksi ketenteraman dan ketertiban, seksi perekonomian, seksi pembangunan, dan seksi kesejahteraan rakyat perlu meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan. Koordinasi tersebut agar tidak hanya melibatkan instansi terkait / lintas sektoral dan masyarakat pengguna layanan, tetapi juga kalangan akademisi dan media masa.

9. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Berdasarkan tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun 2022) adalah sebagai berikut :

1) Rekomendasi DPRD Tahun 2022

Mendasari Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Nomor 100.1.07 / 313 / Bagpem tanggal 26 April 2023 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Tapin terhadap LKPJ Bupati Tapin Tahun Anggaran 2022 yang Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05/DPRD-TPN/2023 Tanggal 26 April 2023 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022. SKPD Kecamatan Binuang tidak mendapatkan rekomendasi khusus dari DPRD.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan Binuang mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada bupati. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Camat kepada bupati.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini memuat penjelasan arah kebijakan umum pemerintahan kecamatan, pengelolaan keuangan kecamatan, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan.

Pelaksanaan pembuatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Camat Binuang Tahun Anggaran 2023 ini juga dimaksudkan sebagai sebuah wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Binuang kepada Bupati Kabupaten Tapin. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang disampaikan ini merupakan salah satu alat sarana untuk melakukan penilaian dan evaluasi yang berguna bagi perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Binuang di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembuatan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kecamatan Binuang Tahun Anggaran 2023 ini dimaksudkan sebagai sebuah wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga merupakan salah satu alat sarana untuk melakukan penilaian dan evaluasi yang berguna untuk perbaikan kinerja di Kecamatan Binuang pada masa yang akan datang.


Serapan anggaran Kecamatan Binuang Tahun 2023 adalah 93,97%, terealisasi Rp 7.969.025.016 dari total anggaran Rp. 8.480.605.477. Sedangkan untuk capaian kinerja program / kegiatan di Kecamatan Binuang mencapai 100 %.

3.2 Saran- saran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kecamatan Binuang Tahun 2023, untuk mempertahankan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan dengan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Setiap SKPD dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yang telah disempurnakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023. Sehingga Visi, Misi, dan arah kebijakan dapat terwujud secara optimal.
3. Kepada seluruh unsur yang ada di Kecamatan Binuang diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Binuang, 19 Januari 2024
Camat Binuang,



H. HENDERIYANOOR EFENDI, S.Kep, Ners,MM
NIP. 19860101 201101 1 015

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Prestasi Kecamatan Binuang Tahun 2023

| No | Prestasi | Instansi Pemberi Penghargaan |
|----|--|--|
| 1 | Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2023 | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia |
| 2 | Lulusan Terbaik Kedua pada Pendidikan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI Tahun 2023 yg diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (atas nama: H. Henderiyanoor Efendi, S.Kep,Ners, MM) | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan |
| 3 | Finalis Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 atas Inovasi SUPERMAN (Sudut Permainan dan Edukasi Minat Anak) | Pj Bupati Tapin |
| 3 | Mampu Memenuhi Target Badan Hukum BUMDesa Pada Satu Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2022 | Bupati Tapin |
| 4 | Juara III Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang) | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan |
| 5 | Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang) | Bupati Tapin |
| 6 | Juara I Lomba Asman Toga Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Desa Padang Sari Kecamatan Binuang) | Bupati Tapin |
| 7 | Juara I Lomba Asman Toga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Desa Padang Sari Kecamatan Binuang) | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan |
| 9 | Juara I Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang) | Bupati Tapin |
| 10 | Juara I Lomba Masak Serba Ikan (Menu Balita) Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang) | Bupati Tapin |

| | | |
|----|--|--|
| 11 | Juara III Lomba Masak B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) (Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang) | Bupati Tapin |
| 12 | Lomba Jambore Posyandu Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Juara 1 Lomba Penyuluhan ➤ Juara 1 Penampilan Kontingen (Yel-Yel) ➤ Juara 1 Lomba Penimbangan dan Pengisian KMS ➤ Juara Kader terbaik berprestasi Kab.Tapin (a.n. Ibu Wiwit Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang) | Ketua TP PKK Kabupaten Tapin |
| 13 | Juara III Lomba Hatinya PKK Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023 (Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang) | Bupati Tapin |
| 14 | Juara I Lomba Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang) | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan |
| 15 | Lomba Jambore PKK Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2023: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Juara Harapan 1 Lomba Administrasi PKK ➤ Juara Harapan 2 Lomba Cerdas Cermat Ceria ➤ Juara Harapan 3 Lomba Yel-Yel Pesan Berantai ➤ Juara Harapan I Lomba Menghias Kue | Ketua TP PKK Kabupaten Tapin |



panrb

KEBANTUAN
PENYANGGUTAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

**Kecamatan Binuang
Pemerintah Kabupaten Tapin**

Sebagai

**Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Sangat Baik"
Tahun 2023**

Jakarta, 21 November 2023

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



H. Abdullah Azwar Anas, M.Si



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN
PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :
KECAMATAN BINUANG

Atas Inovasi :
SUPERMAN (Sudut Permainan Dan Edukasi Minat Anak)

Sebagai :
FINALIS
LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

Rantau, 21 November 2023

Pj. Bupati Tapin

Muhammad Syarifuddin, M.Pd

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



PIAGAM PENGHARGAAN



Dengan bangga mempersembahkan kepada

KECAMATAN BINUANG

Atas Prestasinya Yang Mampu Memenuhi Target
Badan Hukum BUMDesa Pada Satu Kecamatan
Di-Kabupaten Tapin Tahun 2022

BUPATI TAPIN
Rantau, 16 Maret 2023



H.M. ARIFIN ARPAN



KAB. TAPIN

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

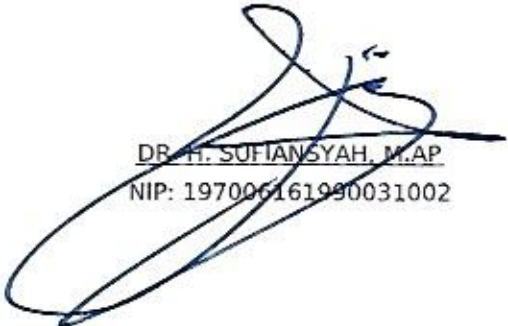
- a. Nama : H.HENDERYANOOR EFENDI,S.Kep,Ners,MM
- b. NIP : 198601012011011015
- c. Jabatan : Camat Binuang

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Tapin sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

| Kode | Nama Formulir |
|----------------------|---|
| DPPA-SKPD | Ringkasan DPPA SKPD |
| DPPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD |
| DPPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD |
| DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


DR. H. SUFIANSYAH, M.AP
NIP: 197006161990031002

Rantau, tanggal 06 Oktober 2023

Disahkan oleh,
PPKD


HARIS FADHILAH, SE, MM
NIP: 197408262005011005



KAB. TAPIN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Pengguna Anggaran :

a. Nama : H.HENDERYANOOR EFENDI,S.Kep,Ners,MM
b. NIP : 198601012011011015
c. Jabatan : Camat Binuang

| Kode | Nama Formulir |
|----------------------|---|
| DPPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD |
| DPPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD |
| DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Disahkan oleh,
PPKD

HARIS FADILLAH, SE, MM
NIP: 197406262005011005



Binuang, tanggal 06 Oktober 2023
Pengguna Anggaran

H.HENDERYANOOR EFENDI,S.Kep.Ners,MM
NIP. 198601012011011015

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Tapin
Tahun Anggaran 2023

**DPPA
REKAPITULASI
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Binuang

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | |
| | Jumlah Pendapatan | Rp0 | Rp0 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | |
| 5 1 | BELANJA OPERASI | Rp5.847.085.005 | Rp6.945.075.037 |
| 5 1 01 | Belanja Pegawai | Rp3.426.141.515 | Rp3.426.142.329 |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp2.420.943.490 | Rp3.518.932.708 |
| 5 2 | BELANJA MODAL | Rp1.447.055.180 | Rp1.535.530.440 |
| 5 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp33.395.180 | Rp508.169.474 |
| 5 2 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp535.260.000 | Rp482.960.000 |
| 5 2 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp878.400.000 | Rp544.400.966 |
| | Jumlah Belanja | Rp7.294.140.185 | Rp8.480.605.477 |
| | Total Surplus/(Defisit) | (Rp7.294.140.185) | (Rp8.480.605.477) |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 | Rp0 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 | Rp0 |
| | Pembiayaan Neto | Rp0 | Rp0 |

| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|--|-----|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp0 | Januari | Rp367.037.774 |
| Februari | Rp0 | Februari | Rp2.098.078.000 |
| Maret | Rp0 | Maret | Rp354.251.528 |
| April | Rp0 | April | Rp619.294.296 |
| Mei | Rp0 | Mei | Rp1.232.413.618 |
| Juni | Rp0 | Juni | Rp416.464.260 |
| Juli | Rp0 | Juli | Rp315.655.848 |
| Agustus | Rp0 | Agustus | Rp302.292.638 |
| September | Rp0 | September | Rp296.716.359 |
| Oktober | Rp0 | Oktober | Rp2.368.134.916 |
| November | Rp0 | November | Rp55.160.000 |
| Desember | Rp0 | Desember | Rp55.106.240 |
| Jumlah | Rp0 | Jumlah | Rp8.480.605.477 |






 Banjar, tanggal 06 Oktober 2023
 Camat Binuang
H. HENDERIYAN KEPEND. S. Kep. Ners. MM
 NIP: 198601012011011015

Mengesahkan,
PPKD


HARIS FADHILAH, SE, MM
 NIP: 197406262005011005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|---|
| 1. | DR. H. SUFIANSYAH, M.AP | 197006161990031002 | Ketua |  |
| 2. | HARIS FADHILAH, SE, M.M | 197406262005011005 | Wakil Ketua I |  |
| 3. | Dr. H. MEIDY HARIS PRAYOGA, SE. ME | 198405222008031001 | Wakil Ketua II |  |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------|--------------------|---------|---|
| 4. | H. ZAINAL ABIDIN, S.Sos | 196811081990101002 | Anggota |  |
| 5. | H. ERRANI MARTIN, SKM.,MM | 196403141988021002 | Anggota |  |
| 6. | FIQRI IRMAWAN, S.STP | 197704091995111001 | Anggota |  |
| 7. | UNDA ABSORI, SH, MH | 197007222005011013 | Anggota |  |
| 8. | GL. RIDHA JAYA W., S.Sos | 196810091990101001 | Anggota |  |
| 9. | DR. H. ZAINAL AQLI, ST, MT | 196902141994031011 | Anggota |  |
| 10. | RIZKAN NOOR, S.T | 198210262009041004 | Anggota |  |
| 11. | RINI YUSNITA, STP, MM | 197902061997112001 | Anggota |  |
| 12. | DR. PADLIANOR, S.Sos, M.AP | 197608171995031001 | Anggota |  |
| 13. | ACHMAD RAMADHAN, S.H | 198605172011011014 | Anggota |  |
| 14. | KHAIRUL, S.AK | 197511142005011007 | Anggota |  |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Kab. Tapin
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Benuang

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | T-1 | Jumlah | | | | | | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
|--------|---------------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urutan | Klasifikasi Belanja | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | 4.988.361.742 | 390.255.180 | 0 | 0 | 5.378.616.922 | 6.086.142.903 | 835.029.474 | 0 | 0 | 6.921.172.377 | 1.542.555.455 | |
| 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 4.273.779.732 | 390.255.180 | 0 | 0 | 4.664.034.912 | 5.081.607.345 | 835.029.474 | 0 | 0 | 5.916.636.819 | 1.252.601.907 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 6.008.000 | 0 | 0 | 0 | 6.008.000 | 6.008.000 | 0 | 0 | 0 | 6.008.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan | | 6.008.000 | 0 | 0 | 0 | 6.008.000 | 6.008.000 | 0 | 0 | 0 | 6.008.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3.430.939.915 | 0 | 0 | 0 | 3.430.939.915 | 3.430.940.729 | 0 | 0 | 0 | 3.430.940.729 | 814 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan | | 3.426.141.515 | 0 | 0 | 0 | 3.426.141.515 | 3.426.142.329 | 0 | 0 | 0 | 3.426.142.329 | 814 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan | | 2.399.200 | 0 | 0 | 0 | 2.399.200 | 2.399.200 | 0 | 0 | 0 | 2.399.200 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan | | 2.399.200 | 0 | 0 | 0 | 2.399.200 | 2.399.200 | 0 | 0 | 0 | 2.399.200 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 397.852.349 | 0 | 0 | 0 | 397.852.349 | 944.623.284 | 0 | 0 | 0 | 944.623.284 | 546.770.935 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Tapin, Benuang, Semua Kelurahan | | 1.484.190 | 0 | 0 | 0 | 1.484.190 | 65.532.966 | 0 | 0 | 0 | 65.532.966 | 64.048.776 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 21.075.291 | 0 | 0 | 0 | 21.075.291 | 36.681.243 | 0 | 0 | 0 | 36.681.243 | 15.605.952 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 66.483.776 | 0 | 0 | 0 | 66.483.776 | 91.571.506 | 0 | 0 | 0 | 91.571.506 | 25.087.730 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|------|----|---|------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 4.890.292 | 0 | 0 | 0 | 4.890.292 | 21.809.413 | 0 | 0 | 0 | 21.809.413 | 16.919.121 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 303.918.809 | 0 | 0 | 0 | 303.918.809 | 729.028.156 | 0 | 0 | 0 | 729.028.156 | 425.109.356 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 0 | 390.255.180 | 0 | 0 | 390.255.180 | 87.212.260 | 835.029.474 | 0 | 0 | 922.241.734 | 531.986.554 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 29.895.180 | 0 | 0 | 29.895.180 | 14.031.320 | 461.982.486 | 0 | 0 | 476.013.806 | 446.118.626 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 360.360.000 | 0 | 0 | 360.360.000 | 73.180.940 | 373.046.988 | 0 | 0 | 446.227.928 | 85.867.928 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 238.537.280 | 0 | 0 | 0 | 238.537.280 | 333.231.456 | 0 | 0 | 0 | 333.231.456 | 94.694.176 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 4.489.200 | 0 | 0 | 0 | 4.489.200 | 6.045.456 | 0 | 0 | 0 | 6.045.456 | 1.556.256 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 44.781.840 | 0 | 0 | 0 | 44.781.840 | 50.777.040 | 0 | 0 | 0 | 50.777.040 | 5.995.200 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 189.266.240 | 0 | 0 | 0 | 189.266.240 | 276.408.960 | 0 | 0 | 0 | 276.408.960 | 87.142.720 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 200.442.188 | 0 | 0 | 0 | 200.442.188 | 279.591.616 | 0 | 0 | 0 | 279.591.616 | 79.149.428 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 45.506.188 | 0 | 0 | 0 | 45.506.188 | 69.655.616 | 0 | 0 | 0 | 69.655.616 | 24.149.428 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 154.936.000 | 0 | 0 | 0 | 154.936.000 | 209.936.000 | 0 | 0 | 0 | 209.936.000 | 55.000.000 | |
| 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | 36.226.000 | 0 | 0 | 0 | 36.226.000 | 36.226.000 | 0 | 0 | 0 | 36.226.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | 36.226.000 | 0 | 0 | 0 | 36.226.000 | 36.226.000 | 0 | 0 | 0 | 36.226.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 36.226.000 | 0 | 0 | 0 | 36.226.000 | 36.226.000 | 0 | 0 | 0 | 36.226.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | 613.282.826 | 0 | 0 | 0 | 613.282.826 | 682.786.532 | 0 | 0 | 0 | 682.786.532 | 69.503.706 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | 146.967.936 | 0 | 0 | 0 | 146.967.936 | 216.471.642 | 0 | 0 | 0 | 216.471.642 | 69.503.706 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 4.417.500 | 0 | 0 | 0 | 4.417.500 | 4.417.500 | 0 | 0 | 0 | 4.417.500 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | T+1 | Jumlah | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|-----------|---------------|---|------------------------------|--------|-----|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan | Bidang | Program | Kejelasan | Sub-Kejelasan | | | | | T (Sebelum) | | | | | T (Setelah) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Setelah) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-9) | 21 |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 142.550.436 | 0 | 0 | 0 | 142.550.436 | 212.054.142 | 0 | 0 | 0 | 212.054.142 | 69.503.706 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | 466.314.890 | 0 | 0 | 0 | 466.314.890 | 466.314.890 | 0 | 0 | 0 | 466.314.890 | 0 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 466.314.890 | 0 | 0 | 0 | 466.314.890 | 466.314.890 | 0 | 0 | 0 | 466.314.890 | 0 | |
| 7 | 01 | 04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | 4.417.500 | 0 | 0 | 0 | 4.417.500 | 130.458.434 | 0 | 0 | 0 | 130.458.434 | 126.040.934 | |
| 7 | 01 | 04 | 7.03 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 4.417.500 | 0 | 0 | 0 | 4.417.500 | 130.458.434 | 0 | 0 | 0 | 130.458.434 | 126.040.934 | |
| 7 | 01 | 04 | 7.03 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 2.208.750 | 0 | 0 | 0 | 2.208.750 | 128.249.684 | 0 | 0 | 0 | 128.249.684 | 126.040.934 | |
| 7 | 01 | 04 | 7.03 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 2.208.750 | 0 | 0 | 0 | 2.208.750 | 2.208.750 | 0 | 0 | 0 | 2.208.750 | 0 | |
| 7 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | 23.065.490 | 0 | 0 | 0 | 23.065.490 | 117.474.398 | 0 | 0 | 0 | 117.474.398 | 94.408.908 | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 23.065.490 | 0 | 0 | 0 | 23.065.490 | 117.474.398 | 0 | 0 | 0 | 117.474.398 | 94.408.908 | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 23.065.490 | 0 | 0 | 0 | 23.065.490 | 117.474.398 | 0 | 0 | 0 | 117.474.398 | 94.408.908 | |
| 7 | 01 | 06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 37.590.194 | 0 | 0 | 0 | 37.590.194 | 37.590.194 | 0 | 0 | 0 | 37.590.194 | 0 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 37.590.194 | 0 | 0 | 0 | 37.590.194 | 37.590.194 | 0 | 0 | 0 | 37.590.194 | 0 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 2.208.750 | 0 | 0 | 0 | 2.208.750 | 2.208.750 | 0 | 0 | 0 | 2.208.750 | 0 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 8.835.000 | 0 | 0 | 0 | 8.835.000 | 8.835.000 | 0 | 0 | 0 | 8.835.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 2.208.750 | 0 | 0 | 0 | 2.208.750 | 2.208.750 | 0 | 0 | 0 | 2.208.750 | 0 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 2.208.750 | 0 | 0 | 0 | 2.208.750 | 2.208.750 | 0 | 0 | 0 | 2.208.750 | 0 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 22.128.944 | 0 | 0 | 0 | 22.128.944 | 22.128.944 | 0 | 0 | 0 | 22.128.944 | 0 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|----------------------------------|-----------------|
| Januari | Rp367.037.774 |
| Februari | Rp1.431.425.950 |
| Maret | Rp354.251.528 |
| April | Rp619.294.296 |
| Mei | Rp626.671.368 |
| Juni | Rp416.464.260 |
| Juli | Rp285.655.848 |
| Agustus | Rp302.292.638 |
| September | Rp296.716.359 |
| Oktober | Rp2.111.096.116 |
| November | Rp55.160.000 |
| Desember | Rp55.106.240 |
| Jumlah | Rp6.921.172.377 |



Rantau, tanggal 06 Oktober 2023
Camat Binuang



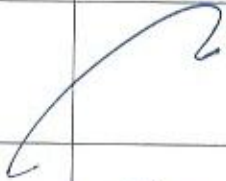
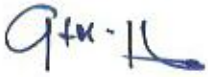



H. HENDERITANOOR EFENDI, S.Kep.Ners, MM
NIP: 198601012011011015



Mengesahkan,
PPKD


HARIS FADILAH, SE, MM
NIP: 197406262005011005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------------------------------------|--------------------|----------------|---|
| 1. | DR. H. SUFIANSYAH, M.AP | 197006161990031002 | Ketua |  |
| 2. | HARIS FADILAH, SE, M.M | 197406262005011005 | Wakil Ketua I |  |
| 3. | Dr. H. MEIDY HARIS PRAYOGA, SE. ME | 198405222008031001 | Wakil Ketua II |  |
| 4. | H. ZAINAL ABIDIN, S.Sos | 196811081990101002 | Anggota |  |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 5. | H. ERRANI MARTIN, SKM.,MM | 196403141988021002 | Anggota |  |
| 6. | FIQRI IRMAWAN, S.STP | 197704091995111001 | Anggota |  |
| 7. | UNDA ABSORI, SH, MH | 197007222005011013 | Anggota |  |
| 8. | Gt. RIDHA JAYA W., S.Sos | 196810091990101001 | Anggota |  |
| 9. | DR. H. ZAINAL AQLI, ST, MT | 196902141994031011 | Anggota |  |
| 10. | RIZKAN NOOR, S.T | 198210262009041004 | Anggota |  |
| 11. | RINI YUSNITA, STP, MM | 197902061997112001 | Anggota | |
| 12. | DR. PADLIANOR, S.Sos, M.AP | 197608171995031001 | Anggota |  |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|---------|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 13. | ACHMAD RAMADHAN, S.H | 198605172011011014 | Anggota |  |
| 14. | KHAIRUL, S.AK | 197511142005011007 | Anggota |  |



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Binuang
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.001 Kecamatan Binuang

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2023 | (%) | REALISASI 2022 |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 5 | BELANJA | 8.480.605.477,00 | 7.969.025.016,00 | 93,97 | 6.037.709.394,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 6.945.075.037,00 | 6.477.678.574,00 | 93,27 | 4.962.433.101,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.426.142.329,00 | 3.214.427.369,00 | 93,82 | 3.349.471.779,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang | 3.518.932.708,00 | 3.263.251.205,00 | 92,73 | 1.612.961.322,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 1.535.530.440,00 | 1.491.346.442,00 | 97,12 | 1.075.276.293,00 |
| 5.2.02 | Belanja Peralatan dan Mesin | 508.169.474,00 | 486.880.692,00 | 95,81 | 130.634.900,00 |
| 5.2.03 | Belanja Bangunan dan Gedung | 482.960.000,00 | 465.418.000,00 | 96,37 | 195.615.000,00 |
| 5.2.04 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 544.400.966,00 | 539.047.750,00 | 99,02 | 749.026.393,00 |
| | SURPLUS / DEFISIT | (8.480.605.477,00) | (7.969.025.016,00) | 0 | (6.037.709.394,00) |
| | SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN | (8.480.605.477,00) | (7.969.025.016,00) | 0 | (6.037.709.394,00) |





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.05 Kecamatan Binuang
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.05.001 Kecamatan Binuang

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / KURANG |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 8.480.605.477,00 | 0,00 | 7.969.025.016,00 | 7.969.025.016,00 | (511.580.461,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 6.945.075.037,00 | 0,00 | 6.477.678.574,00 | 6.477.678.574,00 | (467.396.463,00) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.426.142.329,00 | 0,00 | 3.214.427.369,00 | 3.214.427.369,00 | (211.714.960,00) |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 1.783.642.329,00 | 0,00 | 1.663.193.925,00 | 1.663.193.925,00 | (120.448.404,00) |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 1.367.591.680,00 | 0,00 | 1.295.427.800,00 | 1.295.427.800,00 | (72.163.880,00) |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 1.367.591.680,00 | 0,00 | 1.295.427.800,00 | 1.295.427.800,00 | (72.163.880,00) |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 134.012.773,00 | 0,00 | 117.500.096,00 | 117.500.096,00 | (16.512.677,00) |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 134.012.773,00 | 0,00 | 117.500.096,00 | 117.500.096,00 | (16.512.677,00) |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 166.020.000,00 | 0,00 | 152.110.000,00 | 152.110.000,00 | (13.910.000,00) |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 166.020.000,00 | 0,00 | 152.110.000,00 | 152.110.000,00 | (13.910.000,00) |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 2.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.760.000,00) |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 2.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.760.000,00) |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 25.260.000,00 | 0,00 | 20.245.000,00 | 20.245.000,00 | (5.015.000,00) |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 25.260.000,00 | 0,00 | 20.245.000,00 | 20.245.000,00 | (5.015.000,00) |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 83.382.570,00 | 0,00 | 75.389.220,00 | 75.389.220,00 | (7.993.350,00) |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 83.382.570,00 | 0,00 | 75.389.220,00 | 75.389.220,00 | (7.993.350,00) |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 3.614.273,00 | 0,00 | 2.504.141,00 | 2.504.141,00 | (1.110.132,00) |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 3.614.273,00 | 0,00 | 2.504.141,00 | 2.504.141,00 | (1.110.132,00) |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 1.001.033,00 | 0,00 | 17.668,00 | 17.668,00 | (983.365,00) |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1.001.033,00 | 0,00 | 17.668,00 | 17.668,00 | (983.365,00) |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 1.642.500.000,00 | 0,00 | 1.551.233.444,00 | 1.551.233.444,00 | (91.266.556,00) |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 698.524.840,00 | 0,00 | 659.654.133,00 | 659.654.133,00 | (38.870.707,00) |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 698.524.840,00 | 0,00 | 659.654.133,00 | 659.654.133,00 | (38.870.707,00) |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 107.041.000,00 | 0,00 | 97.173.371,00 | 97.173.371,00 | (9.867.629,00) |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 107.041.000,00 | 0,00 | 97.173.371,00 | 97.173.371,00 | (9.867.629,00) |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 836.934.160,00 | 0,00 | 794.405.940,00 | 794.405.940,00 | (42.528.220,00) |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 836.934.160,00 | 0,00 | 794.405.940,00 | 794.405.940,00 | (42.528.220,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.518.932.708,00 | 0,00 | 3.263.251.205,00 | 3.263.251.205,00 | (255.681.503,00) |



| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / KURANG |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 1.517.967.708,00 | 0,00 | 1.367.988.782,00 | 1.367.988.782,00 | (149.978.926,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 1.517.967.708,00 | 0,00 | 1.367.988.782,00 | 1.367.988.782,00 | (149.978.926,00) |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 62.164.504,00 | 0,00 | 7.622.080,00 | 7.622.080,00 | (54.542.424,00) |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 57.937.961,00 | 0,00 | 57.914.444,00 | 57.914.444,00 | (23.517,00) |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 15.269.906,00 | 0,00 | 15.259.450,00 | 15.259.450,00 | (10.456,00) |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 9.517.655,00 | 0,00 | 9.516.608,00 | 9.516.608,00 | (1.047,00) |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 21.991.596,00 | 0,00 | 21.814.053,00 | 21.814.053,00 | (177.543,00) |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 15.844.257,00 | 0,00 | 15.840.237,00 | 15.840.237,00 | (4.020,00) |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 48.234.271,00 | 0,00 | 48.125.554,00 | 48.125.554,00 | (108.717,00) |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 6.045.456,00 | 0,00 | 6.040.000,00 | 6.040.000,00 | (5.456,00) |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.663.628,00 | 0,00 | 2.663.628,00 | 2.663.628,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 50.837.802,00 | 0,00 | 50.203.000,00 | 50.203.000,00 | (634.802,00) |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 129.419.770,00 | 0,00 | 129.419.770,00 | 129.419.770,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 6.369.110,00 | 0,00 | 6.357.900,00 | 6.357.900,00 | (11.210,00) |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 6.588.288,00 | 0,00 | 6.588.288,00 | 6.588.288,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 511.474.750,00 | 0,00 | 455.090.350,00 | 455.090.350,00 | (56.384.400,00) |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 330.000.000,00 | 0,00 | 302.100.000,00 | 302.100.000,00 | (27.900.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 109.647.000,00 | 0,00 | 105.109.500,00 | 105.109.500,00 | (4.537.500,00) |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 4.507.560,00 | 0,00 | 4.507.560,00 | 4.507.560,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 6.353.040,00 | 0,00 | 6.353.040,00 | 6.353.040,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 56.666.154,00 | 0,00 | 51.028.320,00 | 51.028.320,00 | (5.637.834,00) |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka | 66.435.000,00 | 0,00 | 66.435.000,00 | 66.435.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 1.151.747.000,00 | 0,00 | 1.114.421.550,00 | 1.114.421.550,00 | (37.325.450,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 1.142.119.800,00 | 0,00 | 1.105.571.950,00 | 1.105.571.950,00 | (36.547.850,00) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 18.900.000,00 | 0,00 | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (9.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 25.200.000,00 | 0,00 | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 50.961.000,00 | 0,00 | 32.600.000,00 | 32.600.000,00 | (18.361.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 194.400.000,00 | 0,00 | 194.400.000,00 | 194.400.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 426.000.000,00 | 0,00 | 426.000.000,00 | 426.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 184.000.000,00 | 0,00 | 184.000.000,00 | 184.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 18.400.000,00 | 0,00 | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 26.000.000,00 | 0,00 | 17.800.000,00 | 17.800.000,00 | (8.200.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 2.958.000,00 | 0,00 | 2.958.000,00 | 2.958.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 36.256.000,00 | 0,00 | 36.256.000,00 | 36.256.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 14.644.800,00 | 0,00 | 14.637.850,00 | 14.637.850,00 | (6.950,00) |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan | 2.200.000,00 | 0,00 | 1.220.100,00 | 1.220.100,00 | (979.900,00) |



| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / KURANG |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Luran Jaminan/Asuransi | 2.527.200,00 | 0,00 | 1.749.600,00 | 1.749.600,00 | (777.600,00) |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 1.123.200,00 | 0,00 | 777.599,00 | 777.599,00 | (345.601,00) |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 1.404.000,00 | 0,00 | 972.001,00 | 972.001,00 | (431.999,00) |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 7.100.000,00 | 0,00 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 7.100.000,00 | 0,00 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 209.936.000,00 | 0,00 | 154.450.000,00 | 154.450.000,00 | (55.486.000,00) |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 57.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | (54.000.000,00) |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 54.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (54.000.000,00) |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 152.736.000,00 | 0,00 | 151.250.000,00 | 151.250.000,00 | (1.486.000,00) |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 152.736.000,00 | 0,00 | 151.250.000,00 | 151.250.000,00 | (1.486.000,00) |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 627.232.000,00 | 0,00 | 614.340.873,00 | 614.340.873,00 | (12.891.127,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 627.232.000,00 | 0,00 | 614.340.873,00 | 614.340.873,00 | (12.891.127,00) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 554.932.000,00 | 0,00 | 542.040.873,00 | 542.040.873,00 | (12.891.127,00) |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 72.300.000,00 | 0,00 | 72.300.000,00 | 72.300.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 12.050.000,00 | 0,00 | 12.050.000,00 | 12.050.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 12.050.000,00 | 0,00 | 12.050.000,00 | 12.050.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 12.050.000,00 | 0,00 | 12.050.000,00 | 12.050.000,00 | 0,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 1.535.530.440,00 | 0,00 | 1.491.346.442,00 | 1.491.346.442,00 | (44.183.998,00) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 508.169.474,00 | 0,00 | 486.880.692,00 | 486.880.692,00 | (21.288.782,00) |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 286.170.332,00 | 0,00 | 271.421.488,00 | 271.421.488,00 | (14.748.844,00) |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 104.690.844,00 | 0,00 | 96.925.000,00 | 96.925.000,00 | (7.765.844,00) |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 7.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.740.000,00) |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 96.950.844,00 | 0,00 | 96.925.000,00 | 96.925.000,00 | (25.844,00) |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 171.721.988,00 | 0,00 | 164.738.988,00 | 164.738.988,00 | (6.983.000,00) |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 77.658.000,00 | 0,00 | 74.175.000,00 | 74.175.000,00 | (3.483.000,00) |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 92.600.000,00 | 0,00 | 89.100.000,00 | 89.100.000,00 | (3.500.000,00) |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 1.463.988,00 | 0,00 | 1.463.988,00 | 1.463.988,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 9.757.500,00 | 0,00 | 9.757.500,00 | 9.757.500,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 2.257.500,00 | 0,00 | 2.257.500,00 | 2.257.500,00 | 0,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 215.725.938,00 | 0,00 | 209.186.000,00 | 209.186.000,00 | (6.539.938,00) |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 215.725.938,00 | 0,00 | 209.186.000,00 | 209.186.000,00 | (6.539.938,00) |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 52.849.800,00 | 0,00 | 52.805.000,00 | 52.805.000,00 | (44.800,00) |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 162.876.138,00 | 0,00 | 156.381.000,00 | 156.381.000,00 | (6.495.138,00) |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 6.273.204,00 | 0,00 | 6.273.204,00 | 6.273.204,00 | 0,00 |
| 5.2.02.18.01 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 6.273.204,00 | 0,00 | 6.273.204,00 | 6.273.204,00 | 0,00 |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 6.273.204,00 | 0,00 | 6.273.204,00 | 6.273.204,00 | 0,00 |



| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / KURANG |
|-------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 482.960.000,00 | 0,00 | 465.418.000,00 | 465.418.000,00 | (17.542.000,00) |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 482.960.000,00 | 0,00 | 465.418.000,00 | 465.418.000,00 | (17.542.000,00) |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 482.960.000,00 | 0,00 | 465.418.000,00 | 465.418.000,00 | (17.542.000,00) |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 482.960.000,00 | 0,00 | 465.418.000,00 | 465.418.000,00 | (17.542.000,00) |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 544.400.966,00 | 0,00 | 539.047.750,00 | 539.047.750,00 | (5.353.216,00) |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 544.400.966,00 | 0,00 | 539.047.750,00 | 539.047.750,00 | (5.353.216,00) |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 450.400.966,00 | 0,00 | 445.139.750,00 | 445.139.750,00 | (5.261.216,00) |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya | 450.400.966,00 | 0,00 | 445.139.750,00 | 445.139.750,00 | (5.261.216,00) |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | 94.000.000,00 | 0,00 | 93.908.000,00 | 93.908.000,00 | (92.000,00) |
| 5.2.04.01.02.0013 | Belanja Modal Jembatan Lainnya | 94.000.000,00 | 0,00 | 93.908.000,00 | 93.908.000,00 | (92.000,00) |
| | SURPLUS / DEFISIT | (8.480.605.477,00) | 0,00 | (7.969.025.016,00) | (7.969.025.016,00) | 511.580.461,00 |
| | SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN | (8.480.605.477,00) | 0,00 | (7.969.025.016,00) | (7.969.025.016,00) | 511.580.461,00 |





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN

per 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Binuang

Sub Unit : Kecamatan Binuang

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | | | SISA |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | TOTAL | % | ANGGARAN |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.01.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.008.000,00 | 0,00 | 6.008.000,00 | 0,00 | 6.008.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 6.008.000,00 | 0,00 | 6.008.000,00 | 0,00 | 6.008.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.02.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.426.142.329,00 | 3.214.427.369,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214.427.369,00 | 93,82 | 211.714.960,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.02.5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.399.200,00 | 0,00 | 2.399.100,00 | 0,00 | 2.399.100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.02.7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.399.200,00 | 0,00 | 2.399.100,00 | 0,00 | 2.399.100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 3.430.940.729,00 | 3.214.427.369,00 | 4.798.200,00 | 0,00 | 3.219.225.569,00 | 93,83 | 211.715.160,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 65.532.966,00 | 0,00 | 65.203.000,00 | 0,00 | 65.203.000,00 | 99,50 | 329.966,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 36.681.243,00 | 0,00 | 36.499.680,00 | 0,00 | 36.499.680,00 | 99,51 | 181.563,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 91.571.506,00 | 0,00 | 87.014.840,00 | 0,00 | 87.014.840,00 | 95,02 | 4.556.666,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 21.809.413,00 | 0,00 | 21.709.254,00 | 0,00 | 21.709.254,00 | 99,54 | 100.159,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.06.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 729.028.156,00 | 0,00 | 716.122.873,00 | 0,00 | 716.122.873,00 | 98,23 | 12.905.283,00 |
| | TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | 944.623.284,00 | 0,00 | 926.549.647,00 | 0,00 | 926.549.647,00 | 98,09 | 18.073.637,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.07.6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 476.013.806,00 | 0,00 | 14.004.000,00 | 455.416.704,00 | 469.420.704,00 | 98,61 | 6.593.102,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.07.9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 446.227.928,00 | 0,00 | 0,00 | 340.856.988,00 | 340.856.988,00 | 76,39 | 105.370.940,00 |



| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | | | SISA |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | TOTAL | % | ANGGARAN |
| | TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 922.241.734,00 | 0,00 | 14.004.000,00 | 796.273.692,00 | 810.277.692,00 | 87,86 | 111.964.042,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.08.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 6.045.456,00 | 0,00 | 6.040.000,00 | 0,00 | 6.040.000,00 | 99,91 | 5.456,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.08.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.777.040,00 | 0,00 | 50.770.090,00 | 0,00 | 50.770.090,00 | 99,99 | 6.950,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.08.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 276.408.960,00 | 0,00 | 275.631.360,00 | 0,00 | 275.631.360,00 | 99,72 | 777.600,00 |
| | TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 333.231.456,00 | 0,00 | 332.441.450,00 | 0,00 | 332.441.450,00 | 99,76 | 790.006,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.09.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 69.655.616,00 | 0,00 | 68.851.152,00 | 0,00 | 68.851.152,00 | 98,85 | 804.464,00 |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 1.2.09.6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 209.936.000,00 | 0,00 | 154.250.000,00 | 0,00 | 154.250.000,00 | 73,47 | 55.686.000,00 |
| | TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.916.636.819,00 | 3.214.427.369,00 | 1.506.902.449,00 | 796.273.692,00 | 5.517.603.510,00 | 93,26 | 399.033.309,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 2.2.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | |
| | TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 279.591.616,00 | 0,00 | 223.101.152,00 | 0,00 | 223.101.152,00 | 79,80 | 56.490.464,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 2.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 2.2.02.3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 36.226.000,00 | 0,00 | 36.225.900,00 | 0,00 | 36.225.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 36.226.000,00 | 0,00 | 36.225.900,00 | 0,00 | 36.225.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.01 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | |
| | TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN | 36.226.000,00 | 0,00 | 36.225.900,00 | 0,00 | 36.225.900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.01.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4.417.500,00 | 0,00 | 4.417.300,00 | 0,00 | 4.417.300,00 | 100,00 | 200,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.01.3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 212.054.142,00 | 0,00 | 212.022.548,00 | 0,00 | 212.022.548,00 | 99,99 | 31.594,00 |
| | TOTAL KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA | 216.471.642,00 | 0,00 | 216.439.848,00 | 0,00 | 216.439.848,00 | 99,99 | 31.794,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | |



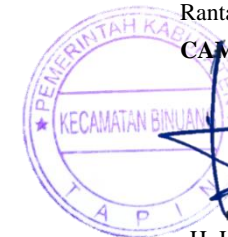
| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | | | SISA |
|--|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | TOTAL | % | ANGGARAN |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 3.2.02.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 466.314.890,00 | 0,00 | 466.314.890,00 | 0,00 | 466.314.890,00 | 100,00 | 0,00 |
| | TOTAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 682.786.532,00 | 0,00 | 682.754.738,00 | 0,00 | 682.754.738,00 | 100,00 | 31.794,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 4.7.03 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | |
| | TOTAL KEGIATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN | 466.314.890,00 | 0,00 | 466.314.890,00 | 0,00 | 466.314.890,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 4.7.03 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 4.7.03.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 128.249.684,00 | 0,00 | 128.246.670,00 | 0,00 | 128.246.670,00 | 100,00 | 3.014,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 4.7.03.2 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 2.208.750,00 | 0,00 | 2.208.650,00 | 0,00 | 2.208.650,00 | 100,00 | 100,00 |
| | TOTAL PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 130.458.434,00 | 0,00 | 130.455.320,00 | 0,00 | 130.455.320,00 | 100,00 | 3.114,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 5.2.01 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | |
| | TOTAL KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 130.458.434,00 | 0,00 | 130.455.320,00 | 0,00 | 130.455.320,00 | 100,00 | 3.114,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 5.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 5.2.01.1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 117.474.398,00 | 0,00 | 117.469.148,00 | 0,00 | 117.469.148,00 | 100,00 | 5.250,00 |
| | TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 117.474.398,00 | 0,00 | 117.469.148,00 | 0,00 | 117.469.148,00 | 100,00 | 5.250,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | |
| | TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH | 117.474.398,00 | 0,00 | 117.469.148,00 | 0,00 | 117.469.148,00 | 100,00 | 5.250,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 2.208.750,00 | 0,00 | 2.208.750,00 | 0,00 | 2.208.750,00 | 100,00 | 0,00 |



| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | | | SISA |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | TOTAL | % | ANGGARAN |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 8.835.000,00 | 0,00 | 8.832.050,00 | 0,00 | 8.832.050,00 | 99,97 | 2.950,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.5 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2.208.750,00 | 0,00 | 2.205.900,00 | 0,00 | 2.205.900,00 | 99,87 | 2.850,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.7 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 2.208.750,00 | 0,00 | 2.208.750,00 | 0,00 | 2.208.750,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.0 . 6.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 22.128.944,00 | 0,00 | 13.105.200,00 | 0,00 | 13.105.200,00 | 59,22 | 9.023.744,00 |
| Jumlah | | 6.921.172.377,00 | 3.214.427.369,00 | 2.502.368.205,00 | 796.273.692,00 | 6.513.069.266,00 | 94,10 | 408.103.111,00 |

Rantau, 17 Januari 2024

CAMAT BINUANG



H. HENDERIANOOR EFENDI, S.Kep.Ners, MM.
NIP198601012011011015





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN

per 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Binuang

Sub Unit : Kelurahan Binuang

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | | | SISA |
|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | TOTAL | % | ANGGARAN |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.1 . 3.2.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.1 . 3.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.1 . 3.2.02.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 222.000.966,00 | 0,00 | 0,00 | 221.706.000,00 | 221.706.000,00 | 99,87 | 294.966,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.1 . 3.2.02.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 317.029.834,00 | 0,00 | 285.151.500,00 | 0,00 | 285.151.500,00 | 89,94 | 31.878.334,00 |
| | Jumlah | 539.030.800,00 | 0,00 | 285.151.500,00 | 221.706.000,00 | 506.857.500,00 | 94,03 | 32.173.300,00 |

Rantau, 17 Januari 2024



Hj. UMIE AMELEA ARTHA, SKM, MM
NIP197108081992033007





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN

per 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Binuang

Sub Unit : Kelurahan Karang Putih

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | | | SISA |
|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | TOTAL | % | ANGGARAN |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.3 . 3.2.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.3 . 3.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.3 . 3.2.02.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 226.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.833.000,00 | 225.833.000,00 | 99,93 | 167.000,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.3 . 3.2.02.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 267.242.250,00 | 0,00 | 251.675.500,00 | 0,00 | 251.675.500,00 | 94,18 | 15.566.750,00 |
| Jumlah | | 493.242.250,00 | 0,00 | 251.675.500,00 | 225.833.000,00 | 477.508.500,00 | 96,81 | 15.733.750,00 |

Rantau, 17 Januari 2024

Plt. Lurah Karang Putih



DUANA, A.Ma.Pd

NIP196512111986081002





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN

per 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Binuang

Sub Unit : Kelurahan Raya Belanti

| KODE | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | | | SISA |
|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | PEGAWAI | BARANG & JASA | MODAL | TOTAL | % | ANGGARAN |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.2 . 3.2.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.2 . 3.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.2 . 3.2.02.2 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 252.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.533.750,00 | 247.533.750,00 | 98,03 | 4.966.250,00 |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.05.1.2 . 3.2.02.3 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 274.660.050,00 | 0,00 | 224.056.000,00 | 0,00 | 224.056.000,00 | 81,58 | 50.604.050,00 |
| | Jumlah | 527.160.050,00 | 0,00 | 224.056.000,00 | 247.533.750,00 | 471.589.750,00 | 89,46 | 55.570.300,00 |

Rantau, 17 Januari 2024

Lurah Raya Belanti



JAIDI, A.Md.Kes

NIP196610151988121002

